

Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Dan Konsep Value For Money



Dimas Samsul Bahri¹, Lidia M. Mawikere ², Djeini Maradesa ³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : bahridimas815@gmail.com¹, lidiamawikere@unsrat.ac.id², djeinim@unsrat.ac.id³

Abstract

Purpose: The purpose of this research is to analyse the measurement of government financial performance using the concept of value for money, with a particular focus on the economic, efficiency and effectiveness ratios at the Manado City National and Political Unity Agency or known as KESBANGPOL.

Design/methodology/approach: This is a qualitative research design with a descriptive approach. The data source used is primary data collected through observation, interviews, and documentation.

Findings: The results showed that the financial performance of the Manado City Kesbangpol Agency had not met the criteria measured by economic, efficiency, and effectiveness ratios. Additionally, the financial performance did not meet the criteria of 'very effective' due to the failure to achieve the set budget target.

Research limitations/implications: The assessment of public sector organizations is not based solely on the outputs produced. Instead, a more comprehensive assessment requires simultaneous consideration of inputs, outputs and outcomes. It is even necessary to include measures of service distribution and coverage (equity and service coverage) into the assessment process.

Keywords

Economist;
Effective;
Efficiency;
Financial Performance;
Value For Money;
Budget.

1. PENDAHULUAN

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang tersebut ditetapkan guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memiliki dua satuan kerja yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih mampu dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. Pemerintah wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban kepada

masyarakat untuk dilihat dan dinilai apakah pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah sudah baik atau belum. Perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap pemerintah daerah agar dapat diketahui tingkat keberhasilannya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. APBD dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Anggaran bisa menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan di daerah masing-masing.

APBD menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan daerahnya, sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan APBD harus memiliki standar yang digunakan sebagai acuan bahwa sebuah daerah dapat dikatakan mandiri, efektif dan efisien. Maka dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja keuangan daerah agar digunakan sebagai parameter ketika menetapkan suatu kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pengukuran organisasi sektor publik menjadi penting untuk mengetahui tingkat pencapaian pelayanan kepada masyarakat. Kinerja organisasi sektor publik dapat diukur menggunakan alat dan indikator yang sesuai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa nilai waktu uang, masukan keluaran hasil dan nilai terbaik dapat dipakai sebagai alat pengukuran kinerja organisasi sektor publik.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan dalam menentukan anggaran pendapatan dan belanjanya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan konsekuensi yang logis berupa pentingnya pengelolaan keuangan yang seefektif dan seefisien mungkin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukannya pengukuran kinerja keuangan, dimana salah satunya dapat menggunakan analisis value for money.

Hal tersebut merupakan elemen pokok value for money yang saling terkait. Ketiga elemen tersebut perlu ditambah dengan dua elemen lagi yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata. Artinya, penggunaan keuangan publik hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat.

Konsep Value for Money merupakan inti dari pengukuran kinerja organisasi sektor pemerintahan. Kinerja organisasi sektor pemerintahan tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, tetapi input, output, dan outcome harus dilihat secara bersama-sama. Bahkan mungkin perlu menambahkan pengukuran cakupan distribusi dan layanan (equity and service coverage). Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip value for money dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang baik, ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Kriteria utama yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dalam pengukuran Value for Money adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang akan dicapai dalam penerapan Value for Money yaitu ekonomis (hemat-cermat), efisiensi dalam penggunaan sumber daya (berdaya guna) dalam pengadaan alokasi sumber daya dan meminimalkan penggunaan sumber daya (efisien), dan hasilnya maksimal (memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya) dan efektif (efektif) dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kinerja keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Manado dengan pengukuran Rasio Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Badan Kesbangpol Kota Manado tidak memenuhi kriteria Ekonomis, Efisien dan Efektif. Pengukuran kinerja keuangan Badan Kesbangpol Kota Manado belum memenuhi kriteria sangat efektif karena realisasi anggaran belum mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang cukup jauh perbedaannya dengan target yang diharapkan disebabkan oleh adanya kegiatan yang dianggarkan, tetapi tidak dilaksanakan. Untuk itu penelitian ini akan dilakukan di Badan Kesbangpol Kota Manado dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan instansi Pemerintah berdasarkan konsep value for money dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

Immanuel R. A. Polii, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money. Hasil penelitian menggunakan rasio ekonomi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2017 sudah ekonomis, karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan dinilai efisien, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 90% sampai 99%. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan yang dikategorikan cukup efektif, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 85% sampai 99%.

Shinta Permata Sari dan Wayan Novitasari melakukan penelitian dengan judul Local Government Financial Statements Disclosure: A Reflection on Governmental Performance in Central Java, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan temuan audit dan belanja APBD berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ukuran legislatif, pendapatan antar pemerintah dan jumlah instansi pemerintah daerah tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

C. Susi Maryanti¹; Agus Munandar melakukan penelitian dengan judul Analisis value for money untuk mengukur kinerja Keuangan pemerintah daerah kota Surabaya Tahun anggaran 2015-2019. Hasil perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 adalah efektif sebesar 99.65%, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 masuk dalam kategori sangat efektif yaitu berkisar antara 100.37% sampai dengan 101.63%.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomik dan rasional (Mardiasmo, 2021). Akuntansi adalah suatu proses mencatat meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. (Astiani dan Sagoro, 2018:1)

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah merupakan proses penggolongan, pencatatan, serta pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, serta kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan termasuk laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Supraja, 2019). Menurut Bachtiar Arif dkk (2002:3) akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

2.3 Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja menurut Menurut Prasadja Ricardianto (2018) kinerja merupakan suatu gambaran tentang tingkat capaian pelaksanaan suatu program kegiatannya atau kebijakannya adalah untuk mewujudkan target sasaran yang meliputi tujuan visi dan misi organisasi tersebut yang diatur dalam rencana strategis suatu organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan (2014), kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.

2.4 Indikator Kinerja

Menurut Bastian (2013) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan menghitung indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impacts).

2.5 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan) (Maya dan Ak, 2021:13). Menurut Sanjaya (2019:16) Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.6 Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Bastian (2013) Pengukuran kinerja merupakan suatu manajemen pencapaian kinerja. Sehingga pengukuran kinerja memiliki tujuan:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan skema kerja serta melakukan tindakan memperbaiki kinerja.

Menurut Robert & Anthony (2001), tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk membantu dalam menetapkan strategi.

2.7 Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Pemerintahan

Menurut Mahsun (2013) Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain :

- a. Kelompok masukan (input)
- b. Kelompok proses (process)
- c. Kelompok keluaran (output)
- d. Kelompok hasil (outcome)
- e. Kelompok manfaat (benefit)
- f. Kelompok dampak (impacts) .

2.8 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik (Mabsun : 2013) adalah :

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk tercapainya kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja

2.9. Kinerja Keuangan

Menurut Francis (2021) Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturanaturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Sari (2021) Kinerja keuangan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan keuangan suatu perusahaan yang melakukan analisis dengan alat analisis keuangan.

2.10. Pengertian Value For Money

Arisaudi (2016) Value for money merupakan tolok ukur dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan menurut Halim (2002) Value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja program, kegiatan dan organisasi, yaitu ekonomi terkait sejauh mana organisasi sektor publik meminimalisir input resource yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, efisiensi terkait pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu dan efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku umum. Sumber data dalam Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau responden yang telah ditentukan oleh peneliti, baik melalui hasil observasi langsung di lokasi penelitian atau wawancara staf atau pegawai pada Badan Kesbangpol Kota Manado.

b. Data Sekunder

Jenis data selanjutnya yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder yaitu, data yang telah diolah terlebih dahulu dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, atau berdasarkan penelitian terdahulu.

3.2.

a. Teknik Pengambilan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan dalam dua cara yakni:

Riset Lapangan (field research)

Yaitu mengumpulkan data-data primer dengan datang langsung ke Badan Kesbangpol kota Manado.

1. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan data. Menurut Adi (2004, h.72) wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data.

2. Observasi

Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008, h.94) mengatakan istilah observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat atau mengamati langsung individu atau kelompok yang dituju.

b. Riset Pustaka (library research)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

3.3. Metode analisis

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Pengukuran rasio dan kategori rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep analisis Value for Money yang dikembangkan dalam keuangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Pengukuran kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Manado dengan metode Value For Money yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas atas pajak daerah, dimana penjelasannya adalah sebagian berikut:

Ketentuan:

- 1) Jika > 100% maka Sangat Ekonomis
- 2) Jika 90%-100% maka Ekonomis
- 3) Jika 80%-90% maka Cukup Ekonomis
- 4) Jika 60%-80% maka Kurang Ekonomis
- 5) Jika < 60% maka Tidak Ekonomis

4.1.1 Rasio Ekonomis

Berdasarkan hasil wawancara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado menyatakan bahwa rasio ekonomis berfokus utama pada pembinaan kerukunan dan persatuan masyarakat dari pada aspek ekonomi secara langsung. Pengukuran ekonomi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Rasio Ekonomis: Realisasi Anggaran/Anggaran (100%)

Berikut ini adalah tabel laporan realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Periode Juli-Desember 2022

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Kota Manado Periode Juli-Desember 2022

Bulan	Anggaran Belanja	Realisasi	Total	Lebih/Kurang
Juli	8.381.600.550,00	368.332.213,00	4.873.852.823,00	(3.507.747.727,00)
Agustus	8.381.600.550,00	513.853.720,00	5.387.706.543,00	(2.993.894.007,00)
September	8.381.600.550,00	193.409.000,00	5.581.115.543,00	(2.800.485.007,00)
Oktober	8.381.600.550,00	1.642.821.326,00	7.223.936.869,00	(1.157.663.681,00)
November	8.381.600.550,00	137.675.000,00	7.361.611.869,00	(1.019.988.681,00)
Desember	8.381.600.550,00	554.103.811,00	7.915.715.680,00	(465.884.870,00)

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Manado

Berdasarkan tabel laporan realisasi anggaran periode Juli-Desember 2022 di atas, maka rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Ekonomis

Periode	Realisasi Anggaran	Anggaran	Rasio
Juli	368.332.213,00	8.381.600.550,00	4,39%
Agustus	513.853.720,00	8.381.600.550,00	6,13%
September	193.409.000,00	8.381.600.550,00	2,30%
Oktober	1.642.821.326,00	8.381.600.550,00	19,60%
November	137.675.000,00	8.381.600.550,00	1,64%
Desember	554.103.811,00	8.381.600.550,00	6,61%

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Manado

Berdasarkan tabel di atas maka rasio ekonomis Badan Kesbangpol adalah kinerja keuangan ada bulan Juli berada dalam rasio 4,39% yang berarti dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan tidak ekonomis. Hal ini karena realisasi anggaran yang kecil ada periode Juli hanya sebesar 4,39%. Kinerja keuangan ada bulan Agustus berada dalam rasio 6,13% yang berarti dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan tidak ekonomis. Hal ini karena realisasi anggaran yang kecil ada periode Agustus hanya sebesar 6,13%. Rasio ekonomis bulan Agustus lebih tinggi dibandingkan bulan Juli, karena terjadi peningkatan sebesar 1,74%. Kinerja keuangan ada bulan September berada dalam rasio 2,30% yang berarti dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan tidak ekonomis. Hal ini karena realisasi anggaran yang kecil ada periode september sebesar 2,30% dan ini lebih rendah dibandingkan pada periode Juli dan Agustus. Periode September terjadi penurunan sebesar 3,83% dibandingkan periode bulan sebelumnya. Kinerja keuangan ada bulan Oktober berada dalam rasio 19,60% yang berarti dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan tidak ekonomis karena berada di bawah 60%.

Hal ini karena realisasi anggaran yang kecil ada periode Oktober. Meskipun demikian rasio ekonomis ini lebih tinggi pada periode sebelumnya yang hanya sebesar 2,30%. Kinerja keuangan ada bulan November berada dalam rasio 1,64% yang berarti dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan tidak ekonomis. Hal ini karena realisasi anggaran turun dibandingkan periode sebelumnya. Kinerja keuangan ada bulan Desember

berada dalam rasio 6,61% yang berarti dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan tidak ekonomis karena lebih kecil dari 60%.

4.1.2 Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado menyatakan bahwa rasio efisiensi dapat diukur dengan melihat seberapa baik pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dalam memelihara kerukunan dan persatuan masyarakat serta dalam melaksanakan tugas-tugas terkait politik.

Berikut diuraikan perhitungan rasio efisiensi berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Rasio Efisiensi: Output/Input (100%)

Berdasarkan rumus rasio efisiensi tersebut maka hasil perhitungan rasio efisiensi pada Badan Kesbangpol Manado adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Efisiensi

Periode	Output	Input	Rasio
Juli	4.873.852.823,00	8.381.600.550,00	58,14%
Agustus	5.387.706.543,00	8.381.600.550,00	64,28%
September	5.581.115.543,00	8.381.600.550,00	66,58%
Oktober	7.223.936.869,00	8.381.600.550,00	86,18%
November	7.361.611.869,00	8.381.600.550,00	87,83%
Desember	7.915.715.680,00	8.381.600.550,00	94,44%

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Manado

Berdasarkan rasio efisiensi di atas, maka rasio efisiensi adalah pada periode Juli, rasio efisiensi adalah 58,14% sangat efisien karena berada di bawah 60%. Pada periode Agustus, rasio efisiensi adalah 64,28% yang berarti efisien, karena berada diantara 60% - 80%. Pada periode September, rasio efisiensi adalah 66,58% yang berarti efisien, karena berada diantara 60% - 80%. Pada periode Oktober, rasio efisiensi adalah 86,18% yang berarti cukup efisien karena berada diantara 80% - 90%. Pada periode November, rasio efisiensi adalah 87,83% yang berarti cukup efisien karena berada diantara 80% - 90%. Pada periode Desember, rasio efisiensi adalah 94,44% yang berarti kurang efisien karena berada diantara 90% - 100%.

4.1.3 Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado menyatakan bahwa rasio efektivitas perlu diperhatikan dalam beberapa faktor yaitu output kegiatan, input keuangan dan hasil atau dampak dimana mengukur sejauh mana kegiatan kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat atau dampak positif bagi masyarakat atau pemerintah setempat.

Berikut diuraikan perhitungan rasio efektivitas berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Rasio Efektivitas= Outcome/Output (100)

Berikut adalah tabel perhitungan rasio efektivitas kinerja keuangan pada Badan Kesbangpol Kota Manado.

Tabel 4. Rasio Efektivitas

Periode	Outcome	Output	Rasio
Juli	368.332.213,00	4.873.852.823,00	7,55%
Agustus	513.853.720,00	5.387.706.543,00	9,53%
September	193.409.000,00	5.581.115.543,00	3,46%
Oktober	1.642.821.326,00	7.223.936.869,00	2,27%
November	137.675.000,00	7.361.611.869,00	1,87%
Desember	554.103.811,00	7.915.715.680,00	7%

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Manado

Berdasarkan hasil perhitungan tabel, maka dapat disimpulkan rasio efektivitas pada periode Juli, rasio efektivitas sebesar 7,55% yang berarti tidak efektif karena berada di bawah 60%. Pada periode agustus rasio efektivitas berada di angka 9,53%. Nilai ini meningkat dibanding periode sebelumnya, tetapi masih berada dalam kategori tidak efektif. Periode bulan September rasio efektivitas turun menjadi 3,46% yang berarti tidak efektif karena berada di bawah 60%. Periode bulan Oktober rasio efektivitas sebesar 2,27%

yang berarti tidak efektif, dan nilai ini menurun dibanding periode sebelumnya. Pada periode November, rasio efektivitas berada di angka 1,87%, lebih rendah dari periode sebelumnya. Rasio ini tidak efektif karena berada di bawah angka 60%. Pada periode Desember nilai efektivitas berada pada angka 7%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, dan masih dalam kategori tidak efektif karena berada di bawah nilai 60%.

4.2. Pembahasan

Value For Money pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Manado mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik di tingkat daerah atau kabupaten/kota memberikan nilai yang optimal dan sepadan dengan hasil yang dicapai dalam pelayanan kepada masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Manado telah mengelola anggaran mereka dengan efisien. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bermutu tinggi dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Konsep Value For Money menekankan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan sebanding dengan kualitas dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Penting bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Manado untuk menjalankan kegiatan dengan transparan. Untuk memastikan bahwa nilai yang optimal diperoleh dari setiap pengeluaran maka harus melakukan penilaian secara berkala terhadap program-program yang dijalankan. Pemantauan yang baik akan membantu efisiensi dapat ditingkatkan atau perbaikan lainnya yang diperlukan. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program-program pemerintah lokal dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik dan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk kepentingan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian rasio ekonomis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Manado lebih berfokus utama pada pembinaan kerukunan dan persatuan masyarakat dan memiliki program atau kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal seperti pelatihan kewirausahaan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rasio ekonomis yang diukur selama periode Juni-Desember 2022 berada dalam kategori tidak ekonomis karena berada di bawah rasio 60%. Rasio Ekonomis kinerja keuangan Kesbangpol periode Juni-Desember 2022 untuk keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 6,77% yang mana termasuk dalam kategori tidak ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol kota Manado belum dapat mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis. Pengukuran ekonomi bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Kesbangpol Kota Manado periode Juli-Desember 2022 dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (input) yang dibutuhkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Keekonomian suatu kegiatan tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Manado, tetapi juga harus mempertimbangkan keluaran (output) yang dihasilkan.

Penghematan menjadi berkurang maknanya jika keluaran (output) yang dihasilkan tidak sesuai target atau tidak dapat tercapai secara maksimal. Ekonomis terkait dengan sejauh mana dapat meminimalisir input primer yang berupa anggaran atau kas menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi, dengan menggunakan anggaran dengan hemat (tidak boros) dan mampu mengelola keuangan dengan baik. Ekonomis merupakan harga terendah untuk kualitas dan kuantitas input tertentu. Ekonomi mengacu pada sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ilmu ekonomi mengubah input primer berupa sumber daya keuangan (uang atau uang tunai) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasional organisasi. (Mahmudi 2015:84)

Berdasarkan hasil penelitian rasio efisiensi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado dapat diukur dengan melihat seberapa baik pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dalam memelihara kerukunan dan persatuan masyarakat serta dalam melaksanakan tugas-tugas terkait politik. Ini bisa mencakup evaluasi terhadap anggaran yang digunakan, efektivitas program-program yang dijalankan, serta tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang telah kami selenggarakan. Rasio efisiensi yang diukur selama Periode Juni-Desember 2022, dimana untuk Pada periode Juli, rasio efisiensi adalah 58,14% sangat efisien karena berada di bawah 60%. Sementara Pada periode Agustus,

rasio efisiensi adalah 64,28% yang berarti efisien, karena berada diantara 60%-80%. Periode selanjutnya, Pada September, rasio efisiensi adalah 66,58% yang berarti efisien, karena berada diantara 60%-80%. Pada periode Oktober, rasio efisiensi adalah 86,18% yang berarti cukup efisien karena berada diantara 80%-90%. Pada periode November, rasio efisiensi adalah 87,83% yang berarti cukup efisien karena berada diantara 80%-90% Pada periode Desember, rasio efisiensi adalah 94,44% yang berarti kurang efisien karena berada diantara 90% - 100%. Rasio Efisiensi secara keseluruhan termasuk dalam kategori kurang efisien. Penyebab terjadinya ketidakefisienan anggaran tersebut dikarenakan terjadinya pemborosan-pemborosan pada sektor tertentu, seperti sudah tersedianya fasilitas yang sudah memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan, ini dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja yang setiap tahun terus mengalami kenaikan, kemudian penyebab ketidakefisienan anggaran yaitu besarnya pengeluaran belanja yang didominasi belanja pegawai, seperti perjalanan dinas/kegiatan rapat diluar kantor atau pengadaan kendaraan dinas baru di Instansi pemerintahan. Besarnya realisasi anggaran belanja dari realisasi pendapatan yang diterima mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

Efisiensi berarti mencapai output yang maksimal dengan input tertentu, atau menggunakan input terkecil untuk mencapai output tertentu dengan sedikit usaha untuk mencapai tujuan. Efisiensi dihitung menggunakan rasio antara output dan input. Semakin tinggi output dibandingkan input, sehingga bertambah pula efisiensi dari organisasi. Tingkat efisiensi diukur dengan rumus (Mahmudi 2015:85)

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektivitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado perlu diperhatikan beberapa faktor tertentu yaitu dalam output kegiatan yang meliputi jumlah dan kualitas kegiatan yang telah dilakukan. Faktor input keuangan yang merupakan jumlah anggaran atau sumber daya keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Faktor dalam hasil atau dampak dimana mengukur sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat atau dampak positif bagi masyarakat atau pemerintah setempat. Rasio efektivitas yang diukur selama periode JuniDesember 2022, dimana pada periode Juli, rasio efektivitas sebesar 7,55% yang berarti tidak efektif karena berada di bawah 60%. Pada periode agustus rasio efektivitas berada di angka 9,53%. Nilai ini meningkat dibanding periode sebelumnya, tetapi masih berada dalam kategori tidak efektif. Periode bulan September rasio efektivitas turun menjadi 3,46% yang berarti tidak efektif karena berada di bawah 60%. Periode bulan Oktober rasio efektivitas sebesar 2,27% yang berarti tidak efektif, dan nilai ini menurun dibanding periode sebelumnya. Pada periode November, rasio efektivitas berada di angka 1,87%, lebih rendah dari periode sebelumnya. Rasio ini tidak efektif karena berada di bawah angka 60% Rasio Efektivitas Badan Kesbangpol Kota Manado rata-rata sebesar 5,28% yang mana termasuk dalam kategori tidak efektif. Pengukuran Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Manado sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Tetapi masih banyak output yang dihasilkan terhadap pencapaian belum sesuai tujuan atau sasaran. Pengukuran efektivitas Badan Kesbangpol Kota Manado belum memenuhi kriteria sangat efektif karena realisasi anggaran belum mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang cukup jauh perbedaannya dengan target yang diharapkan disebabkan oleh adanya kegiatan yang dianggarkan, tetapi tidak dilaksanakan.

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu program yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, efektivitas adalah perbandingan outcome dengan output. Efektivitas berkaitan

dengan hasil dan tujuan. Semakin besar kontribusi hasil untuk mencapai suatu tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. (Mardiasmo 2018: 134).

5. KESIMPULAN

1. Rasio ekonomis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Manado berfokus utama pada pembinaan kerukunan dan persatuan masyarakat dan memiliki program atau kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Rasio ekonomis yang diukur selama periode Juni-Desember 2022 berada dalam kategori tidak ekonomis karena berada di bawah rasio 60%. Rasio Ekonomis kinerja keuangan Kesbangpol periode Juni-Desember 2022 untuk keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 6,77% yang mana termasuk dalam kategori tidak ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol kota Manado belum dapat mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis.
2. Rasio efisiensi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado dapat diukur dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta dalam melaksanakan tugas-tugas terkait politik. Pada periode Desember, rasio efisiensi adalah 94,44% yang berarti kurang efisien karena berada diantara 90%-100%. Rasio Efisiensi secara keseluruhan termasuk dalam kategori kurang efisien. Penyebab terjadinya ketidakefisienan anggaran tersebut dikarenakan terjadinya pemborosan-pemborosan pada sektor tertentu, seperti sudah tersedianya fasilitas yang sudah memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan.
3. Rasio efektivitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado perlu diperhatikan beberapa faktor tertentu yaitu dalam output kegiatan, input keuangan, hasil atau dampak. Rasio efektivitas yang diukur selama periode Juni-Desember 2022, dimana pada periode Juli, rasio efektivitas sebesar 7,55% yang berarti tidak efektif karena berada di bawah 60%. Pada periode agustus rasio efektivitas berada di angka 9,53%. Nilai ini meningkat dibanding periode sebelumnya, tetapi masih berada dalam kategori tidak efektif. Periode bulan September rasio efektivitas turun menjadi 3,46% yang berarti tidak efektif karena berada di bawah 60%. Periode bulan Oktober rasio efektivitas sebesar 2,27% yang berarti tidak efektif, dan nilai ini menurun dibanding periode sebelumnya. Pada periode November, rasio efektivitas berada di angka 1,87%, lebih rendah dari periode sebelumnya. Rasio ini tidak efektif karena berada di bawah angka 60% Rasio Efektivitas Badan Kesbangpol Kota Manado rata-rata sebesar 5,28% yang mana termasuk dalam kategori tidak efektif. .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Anthony. Robert N. and Vijay Govindarajan. (2001). Management Control System, Tenth Edition. New York, Mc Graw-Hill Irwin.
- Arisaudi, Z. (2016). Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Value For Money Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Palembang. Indonesia.
- Astiani, Y., & Sagoro, E. M. (2018). Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tentang Akuntansi, dan Skala Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 6(2).
- Bachtiar, Arif dkk. (2002). Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2013). Sistem Akuntansi Sektor Publik, edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

- Francis Hutabarat, M. B. A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan. Desanta Publisher.
- Hasibuan, Malayu. S. P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Bumi Aksara. Jakarta.
- Mahsun. (2013). Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Maya Sari, S. E., & Ak, M. S. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Good Corporate Governance. Umsu Press.
- Prasadja, Ricardianto. (2018). Human Capital Management. In Media, Bogor.
- Sanjaya, D. H. (2019). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Sari, W. (2021). Kinerja Keuangan. PUBLISH BUKU UNPRI PRESS ISBN, 1 (1).
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 115-130.